

DOI <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v7i3.1175>

Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat (*Telaah Neo-Realisme: National Interest-Balance of Power*)

Adnan Adwitama^{1*}

¹Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: adwitama24@gmail.com

Abstract - The clash between regions Morocco and Western Sahara has been so fierce that it has resulted in a prolonged war. Every camp, both Morocco and Western Sahara, both want to take over the Western Sahara region. Both have their respective support from outside and have not found a bright spot. This study aims to see the role of Morocco in defending the Western Sahara region. The efforts made by Morocco are described in this article. The type of research used is library research or literature review using descriptive analysis methods. The data used by news writers in electronic media, journal articles, theses, theses, and dissertations discussing Morocco and Western Sahara as well as studies on defense and security policies as well as neorealism theory. The theory used is the theory of neorealism on the aspect of national interest-balance of power. The result obtained from the analysis of the conflict between Morocco and Western Sahara is that Morocco's role in balancing forces, Morocco is able to balance truce from within and from outside. Strong Moroccan planning with the establishment of the Royal Advisory Council for Saharan Affairs (CORCAS) as well as external support by building cooperation between superpowers, the United States of America and France to balance United Nation support for Western Sahara and cooperation surrounding countries such as Algeria and Libya.

Abstrak - Perseteruan antara kedua wilayah antara Maroko dan Sahara Barat hingga saat ini terjadi sangat sengit sehingga menimbulkan perang yang berkepanjangan. Setiap kubu, baik Maroko ataupun Sahara Barat sama-sama ingin mengambil alih wilayah Sahara Barat tersebut. Keduanya memiliki dukungan masing-masing dari luar dan belum menemukan titik terang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Maroko dalam mempertahankan wilayah Sahara Barat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Maroko akan dipaparkan dalam artikel ini. Jenis penelitian yang digunakan ialah library research atau kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan penulis berita di media elektronik, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas tentang Maroko dan Sahara Barat serta kajian yang mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme. Adapun teori yang digunakan ialah teori neorealisme pada aspek national interest-balance of power. Hasil yang didapatkan dari telaah konflik antara Maroko dan Sahara Barat ialah bahwasanya peran Maroko dalam menyeimbangkan kekuatan-kekuatan, Maroko mampu menyeimbangi gencatan-gencatan dari dalam maupun dari luar. Perencanaan Maroko yang kuat dengan pembentukan Royal Advisory Council for Saharan Affairs (CORCAS) atau Dewan Penasehat Kerajaan untuk Sahara Maroko dan juga dukungan dari luar dengan membangun kerjasama antara negara-negara super power seperti Amerika Serikat dan Prancis untuk menyeimbangkan dukungan PBB terhadap Sahara Barat dan kerjasama negara-negara sekitarnya seperti Aljazair dan Libya.

Keywords – Maroko, Sahara Barat, Balance of Power, Neorealism

PENDAHULUAN

Maroko dan Sahara Barat merupakan dua wilayah yang saling berdampingan dan terletak di kawasan Timur Tengah. Maroko sendiri memiliki letak yang sangat geografis. Maroko terletak di bagian barat laut Afrika, kemudian berbatasan dengan Samudera Atlantik dan Laut Alboran milik Aljazair di sebelah timur, sebelah utara Maroko terletak di selat Gibraltar yang memisahkannya dengan Spanyol dan daratan Eropa. Adapun letak geografis wilayah Sahara Barat tepat berada di sebelah barat daya Maroko (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Kondisi wilayah yang saling berdekatan ini merupakan awal mula konflik yang terjadi di antara Maroko dan Sahara Barat. Perseteruan antara keduanya hingga saat ini belum memiliki titik terang. Sahara Barat menginginkan kemerdekaan, sedangkan Maroko ingin mengembalikan kekuasaannya di masa lampau. Pertikaian yang berlangsung sejak dahulu hingga saat ini tidak hanya menjadi isu nasional semata, melainkan sudah menjadi dan diangkat ke ranah internasional. Campur tangan Amerika dan Prancis juga turut andil berada di kubu pendukung Maroko, sedangkan di kubu Sahara Barat terdapat Mauritania dan Aljazair serta dibantu oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyelesaikan konflik antara kedua kubu tersebut.

Konflik berkepanjangan ini tentunya dipengaruhi oleh aspek yang mendasar yaitu kedua kubu sama-sama mempertahankan wilayahnya. Dalam teori hubungan internasional dikenal sebuah konsep neorealisme yang di dalamnya terdapat aspek *balance of power*. Neorealisme merupakan salah satu teori utama kajian kontemporer dalam kajian Hubungan Internasional. Neorealisme merupakan pengembangan dari realisme, sehingga ia disebut juga dengan istilah realisme struktural. *Neorealisme* adalah sebuah teori penting dalam hubungan internasional yang berfokus pada struktur internasional. Konsep neorealisme sendiri mengacu pada adanya efek internasional yang akan mempengaruhi suatu negara sehingga terjadinya kegiatan yang anarkis (Dugis, 2016), namun dengan adanya *balance of power* atau keseimbangan kekuatan antara dua kubu yang bertikai justru mampu menghentikan gencatan senjata dan mengakhiri suatu pertikaian.

Keseimbangan antara wilayah atau negara yang bertikai akan memunculkan konsep *balance of power*, di mana setiap kubu mampu mempertahankan apa yang mereka miliki. Konsep *balance of power* ini mampu mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Mereka juga akan menjaga wilayah mereka agar tidak termonopoli oleh pihak lain. dengan berbagai aspek, baik itu internal maupun eksternal. Dengan itu, ketika serangan dari setiap kubu seimbang, mampu menciptakan kesegangan antar kubu. Selain itu, konsep ini juga dianggap mampu mempertahankan kondisi keamanan secara baik sehingga tidak terjadi perang yang akan memporak-porandakan sebuah wilayah. Jalan yang ditempu hanyalah sekadar saling menguatkan posisi mereka serta kekuatan agar tidak menjadi aktor yang dimangsa.

Maka dari itu, melihat konflik antara dua kubu tersebut, penulis ingin menelaah seberapa besar usaha yang dilakukan oleh Maroko dalam menyatukan kembali wilayahnya yang diklaim oleh Sahara Barat dan terpisah karena adanya penjajahan oleh bangsa Eropa. Usaha-usaha tersebut serta peran yang dilakukan oleh Maroko dalam mempertahankan wilayah Sahara Barat akan dikaji dengan kajian *balance of power* pada konsep neorealisme.

Adapun penelitian-penelitian yang pernah membahas tentang konflik antara Maroko dan Sahara Barat di antaranya, pertama “Analisis Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik” ditulis oleh Sri Khairunnisa Ariyati dan diterbitkan pada *Journal of International Relations*, Universitas Pelita Harapan. Dalam tulisannya, beliau membahas tentang penyebab terjadinya konflik di wilayah Sahara Barat, siapa pemeran dan apa kepentingan aktor dari konflik tersebut, serta apa upaya yang dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi di wilayah Sahara Barat. Hasil dari penelitian ini menetapkan bahwa aktor dari konflik ini terdiri dari lima kubu yaitu Maroko, Front Polisario yang mewakili Sahara Barat, Aljazair, Mauritania, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah dilakukannya analisis, penulis berkesimpulan bahwasanya yang menjadi penyebab konflik ini ialah adanya perbedaan pandangan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau, dimana penjajah tidak tuntas dalam membagi wilayah suatu kawasan. Penulis beranggapan bahwasanya selama ini penanganan penyelesaian konflik ini selalu gagal dikarenakan adanya kesalahan terhadap analisis konflik, sehingga penulis berpendapat bahwasanya

perundingan damai merupakan jalan yang paling netral dan aman dalam menciptakan perdamaian antara Sahara Barat dengan Maroko (Ariyati, 2020).

Kedua, penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Keterlibatan Aljazair dalam Konflik Maroko-Sahara Barat 2000-2013”. Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Arifin pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Analisis penelitian ini dititikberatkan pada peran Aljazair dalam menangani konflik di wilayah yang berbatasan dengan negaranya, utamanya pada konflik Maroko dan Sahara Barat. Peneliti mengambil sampel antara tahun 2000 hingga 2013. Usaha-usaha yang dilakukan Aljazair di antaranya menampung pengungsi dari Sahara Barat. Aljazair juga menawarkan keuangan, politik dan dukungan militer untuk berbagai gerakan pembebasan di Afrika dan mempunyai peran penting dalam Organisation of African Unity (OAU). Namun, yang paling pokok ialah Aljazair sangat berperan penting dalam pembebasan lahan wilayah yang dibombardir perang, membantu mencari keadilan dan perdamaian bagi bangsa masih berada dalam pengaruh dekolonisasi (ARIFIN, 2016).

Selanjutnya, penelitian yang mengkaji peran PBB dalam penyelesaian konflik Maroko-Sahara Barat. Penulis menemukan tiga penelitian serupa namun berbeda pada kurun waktu yang diteliti. Peneliti pertama (PUTRI, 2014), penulis kedua (YOGA, 2017), sedangkan yang terakhir “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mencari Jawaban atas Konflik Sahara Barat” (Aarnee, 2020), ketiga penelitian ini semua membahas peran PBB dalam menangani konflik di kawasan Maroko dan Sahara Barat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan PBB di antaranya, membentuk tim pasukan yang dinamai MINURSO (The United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara). Pasukan-pasukan ini bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah konflik Maroko dan Sahara Barat sekaligus mengawasi jalannya referendum di antara kedua pihak yang bertikai. Selain itu, PBB juga membuat perjanjian untuk meredam konflik kedua belah pihak. Hingga saat ini, PBB sedang membuat kerangka perjanjian baru agar akhirnya perjanjian tersebut dapat diterima oleh kedua pihak yang bertikai dan juga memperpanjang mandat pasukan MINURSO di kawasan Sahara Barat hingga bulan April tahun 2014 (PUTRI, 2014).

Begitu banyak penelitian yang membahas tentang konflik antara Maroko-Sahara Barat, namun belum ada satu pun yang memfokuskan kajiannya terhadap Maroko dalam menyeimbangkan kekuatan dalam mempertahankan wilayah yang dianggap miliknya sebelum adanya penjajah. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pihak Maroko dalam menjalankan misi dan kekuatannya pada pertahanan merebut daerah kekuasaan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Al Priyadi Hidayat, 2005), penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain) (Al Priyadi Hidayat, 2005), dalam penelitian ini, peneliti mengambil tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan atau biasa disebut dengan penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2018).

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat sekunder karena penelitian diposisikan sebagai upaya awal dalam mengambil perspektif teori neorealisme dalam menganalisis posisi Maroko saat ini terhadap dinamika yang terjadi (Setiawan, 2021), data sekunder tersebut diperoleh dari literatur yang berasal dari berita di media elektronik dan karya ilmiah seperti, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang membahas tentang Maroko dan Sahara Barat serta kajian yang mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan maupun teori neorealisme. Data yang digunakan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan atau konsep *balance of power* pada teori neorealisme. Lebih jelas lagi, teori neorealisme yang digunakan bersumber pada pandangan neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979). Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam analisis dengan menjabarkan secara holistik. Dari sinilah ditemukan dan memperjelas posisi Maroko dalam menghadapi konflik dengan Sahara Barat. Neorealisme menekankan pentingnya melihat bagaimana

kondisi struktur internasional dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Dengan neorealisme *balance of power*, dapat dilihat bahwa kekuatan (*power*) suatu negara adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam system internasional (Setiawan, 2021), *Balance of power* ini nantinya dibagi menjadi dua aspek, sejarah konflik dan kepentingan nasional antara kedua belah pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik

Konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat sudah berlangsung hampir setengah abad. Salah satu faktor yang memicu konflik ini ialah dekolonisasi. Proses dekolonisasi yang terjadi setelah Perang Dunia II meninggalkan banyak jejak kasus termasuk kewenangan pada hak kepemilikan perbatasan wilayah. Perseteruan antara Sahara Barat dengan Maroko memang bisa dianggap sebagai salah satu contoh dekolonisasi di mana pada waktu itu Spanyol sebagai penjajah Sahara Barat meninggalkan jejaknya dan menyisakan bagian-bagian perbatasan yang semu antara Maroko dan “Sahara Spanyol” (sekarang Sahara Barat) yang kemudian menjadi perselisihan berkepanjangan antara negara Maroko dan Front Polisario, tentara orang-orang Sahara (Wikipedia, 2021).

Dalam hal ini terjadi dilema antara dua komunitas yang berselisih. Mereka sebagai dua buah komunitas yang memiliki etnis yang berbeda juga berlawanan dengan garis peta yang disepakati oleh para penjajah, dan mereka ingin memperbaiki peta pada saat mereka bebas untuk melakukan hal itu. Perbedaan inilah yang menjadi sebagai awal mula perang yang tak berkesudahan dan belum terselesaikan hingga saat ini (Reilly, 2000).

Masa kolonialisme Bangsa Eropa memang mendominasi di wilayah Asia dan Afrika. Pada masa itu, Bangsa Eropa memperlihatkan jiwa superiornya. Negara-negara mereka menjajah negara lain demi memperluas ekspansi wilayah. Prancis berhasil mendapatkan wilayah Maroko, Mauritania, dan Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat dan Spanyol mendapatkan sebagian dari wilayah Sahara Barat. Ketertarikan Bangsa Eropa dalam menjajah beberapa wilayah di belahan dunia, bukan hanya ingin memperluas ekspansi kekuasaan, akan tetapi juga ingin mendapat

keuntungan dari segi sumber daya alam. Spanyol misalnya, ia mendapat banyak keuntungan ketika menduduki Sahara Barat di mana sumber daya alam Sahara Barat didominasi oleh sumber-sumber mineral termasuk fosfat dan bijih besi (ARIFIN, 2016).

Di tengah-tengah penjajahan yang terjadi, tentu negara yang diduki mengeluarkan perlawanan, maka dari itu di wilayah Sahara Barat terbentuklah *Front Polisario* yang ingin memukul mundur penjajah Spanyol. *Front Polisario* terbentuk pada tahun 1973 sehingga singkat cerita, pada tahun 1975, Spanyol gagal dalam memperpanjang masa kolonialisasinya. Setelah mendapat kemerdekaan dari Spanyol, *Front Polisario* bermaksud ingin membangun wilayah Sahara Barat menjadi sebuah negara yang berdaulat dan diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Maka dari itu, terbentuklah Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) atau biasa disebut dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi (ARIFIN, 2016).

Perjuangan *Front Polisario* tidak berhenti sampai situ. Di balik pelepasan wilayah jajahan Spanyol, terbentuklah masalah baru. Spanyol tidak melepas Sahara Barat begitu saja, akan tetapi ia memberikannya kepada Maroko dan Mauritania dengan imbalan yang belum diketahui jelasnya dan masih simpang siur apa yang terdapat pada perjanjian Maroko, Mauritania, dan Spanyol. Akan tetapi, pada akhirnya yang masih berjuang mempertahankan wilayah Sahara Barat hanyalah Maroko (ARIFIN, 2016), pada tahun 1979, Mauritania mundur dari perebutan wilayah tersebut dikarenakan banyaknya tekanan dari luar dan mendominasinya pergerakan dari Maroko (Maddy-Weitzman, 1991).

Maroko dengan gencarnya bermaksud menyatukan yang mereka anggap wilayahnya sebelum terjadinya penjajahan Spanyol. Sedangkan *Front Polisario* yang didominasi oleh etnik Sahrawi juga tidak ingin bergabung dengan Maroko dan ingin mendapatkan kewenangan dalam membangun negaranya sendiri, bukan dengan iktu berdaulat pada negara tetangganya, Maroko. Ini merupakan alasan terbesar mengapa keduanya belum bisa bersatu.

Kepentingan Nasional

Maroko merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional parlementer dan dipimpin oleh seorang raja. Maroko memiliki letak geografis yang strategis dan

menjadi perlintasan antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, sehingga terdapat percampuran kebudayaan yang sangat kaya di Maroko. Selain itu, kekayaan sumber daya alamnya juga melimpah. Maroko memiliki fosfor di wilayahnya dan menjadi produsen fosfor ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Maroko berbatasan langsung negara yang masih menjadi wilayah sengketa saat ini, Sahara Barat. Hingga saat ini, sekitar 80% wilayah Sahara Barat sudah dikuasai oleh Maroko. Walaupun sejak tahun 1960an, PBB sudah menghimbau dan menuntut Sahara Barat untuk merdeka. Namun berbagai upaya yang dilakukan oleh PBB sampai sekarang belum membuahkan hasil. National Interest atau Kepentingan Nasional merupakan suatu gagasan yang bersifat sangat umum tetapi menjadi suatu yang sangat penting bagi negara. Dalam kepentingan nasional, hal-hal yang menjadi unsur darinya ialah kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Morgenthau sebagai pencetus istilah ini berpendapat bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Morgenthau menyatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntun oleh pengejaran kepentingan nasional, dan kepentingan nasional itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara (Wafa, 2019).

Dalam pandangan Donal E. Neuchterlin terdapat empat dasar yang menjadi pondasi kepentingan nasional. Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*), Kepentingan Tata Internasional (*World Order Interest*), Kepentingan Pertahanan (*Military Interest*), Kepentingan Ideologi (*Ideology Interest*). Dua dari empat dasar tersebut merupakan pegangan Maroko dan sebagai alasan untuk menguasai Sahara Barat. Dua kepentingan tersebut termasuk dalam kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional (Kepentingan Politik). Keempatnya bertujuan mampu meningkatkan hubungan perdagangan sehingga mempermudah Maroko dalam perluasan pengaruh ekonominya dan untuk memengkan sengketa Sahara Barat (Wafa, 2019), alasan-alasan yang menyebabkan Maroko tidak ingin mengalah dan menghentikan gencatan senjatanya datang dari berbagai aspek seperti

ideologi-historis, politik, dan ekonomi (Martina, n.d.).

Pada segi ideologi-historisnya, Maroko menganggap bahwa Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) adalah sekelompok pemberontak yang berasal dari etnis Sahrawi yang ingin membentuk negara sendiri dan menolak kedaulatan Maroko di Sahara Barat. Namun, apabila ditarik ke belakang dari aspek historisnya, jauh sebelum datangnya kolonial di tanah Maroko dan Sahara. Menurut pemaparan Teguh Santosa, Direktur Bidang Promosi, Media Luar Negeri DK-PRIMA dalam wawancara dengan media online Republik Merdeka, mengatakan bahwa Kerajaan Maroko sudah berdiri sejak abad ke-9 dan termasuk kerajaan tertua di dunia dan konflik antara Sahara dan Maroko sudah ada sejak Konferensi Berlin pada tahun 1884-1885. Kesepakatan pada konferensi tersebut memutuskan untuk membagi dua kekuasaan Eropa di wilayah Afrika. Para penjajah dari Bangsa Eropa mulai gencar di tanah Afrika dan akhirnya Maroko jatuh ke tangan Prancis, sedangkan Sahara berada di Pihak Spanyol dan wilayah tersebut lebih dikenal dengan Sahara Barat. Ini merupakan buah dari Perjanjian Fez yang terjadi pada bulan Maret 1912. Setelah beberapa tahun menduduki wilayah tersebut, pasca perang dunia kedua, Prancis melepaskan Maroko dan Front Polisaria menekan Spanyol hingga akhirnya Spanyol melakukan perjanjian kepada Maroko dan Mauritania lalu menyerahkan Sahara Barat kepada keduanya. Lambat laun, akibat tekanan dari berbagai pihak, Mauritania juga mundur dan melepaskan Sahara Barat. Dalam kacamata historis, Maroko masih berupaya mempertahankan wilayah Sahara Barat sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Maroko karena di masa lampau mereka memiliki kekuasaan tersebut dan wilayah tersebut berhak direbut kembali. Akan tetapi, Sahara Barat yang disokong oleh Front Polisaria menganggap bahwa dekolonisasi setelah masa jajahan Spanyol sudah berada di pihak mereka karena kelompok mereka yang mengusir penjajah Spanyol. Front Polisaria dan etnis Sahrawi lainnya merasa pantas dan berhak dalam membangun negaranya sendiri dan diakui oleh negara-negara di dunia.

Dalam kacamata politik yang didukung oleh aspek historis yang telah dipaparkan sebelumnya, Kerajaan Maroko memiliki hak untuk melakukan ekspansi kekuasaan. Dengan alasan lain, pada tahun 1975 Spanyol tidak melepas kekuasaannya begitu saja dan membiarkan Sahara Barat merdeka, melainkan menyerahkan kekuasaannya pada

Maroko dan Mauritania dalam sebuah perjanjian, namun tidak diketahui secara jelas isi perjanjian tersebut. Maka dari itu, secara resmi bahwa Sahara Barat jatuh ke tangan Maroko dan Mauritania, walaupun pada akhirnya Mauritania memilih meninggalkan Sahara Barat pada tahun 1979.

Adapun aspek yang terpenting ialah aspek ekonomi di mana Sahara Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan letak geografis Sahara Barat, luas daratan Sahara Barat seluas 266.000 km². Akan tetapi wilayah seluas tersebut hanya didominasi oleh gurun-gurun yang luas membentang (ARIFIN, 2016), wilayah tersebut cenderung beriklim tropis dan bercuaca panas, sehingga kadar sinar matahari tinggi. Pemerintah Kerajaan Maroko melihat peluang tersebut dan enggan melepaskan dan mengakui kemerdekaan terhadap Sahara Barat. Dengan dukungan aspek ideologi-historis maupun politik, Maroko memiliki kemenangan mutlak terhadap kekuasaan Sahara Barat. Dengan potensi-potensi tersebut, Maroko mampu memanfaatkan sinar matahari tersebut dan sangat memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebagaimana yang sudah ada dan dimiliki oleh pihak Kerajaan Maroko.

Balance of Power antara Maroko dan Sahara Barat

Konsep neorealisme memfokuskan titik tumpunya pada negara atau wilayah yang berseteru. Sehingga, aturan-aturan yang telah diatur dalam hukum internasional tidak dianggap keberadaannya. Negara merupakan aktor utama dan mereka yang mengendalikan jalannya suatu alur persetujuan dan konflik masing-masing. Menurut Mersheimer, neorealisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa dalam mempertahankan persaingan antar-negara pada sistem internasional anarki, diperlukan adanya aktor superpower pada politik internasional dan superpower tersebut merupakan negaranya masing-masing (Dugis, 2016) para neorealis beranggapan bahwa ketika dua kubu memiliki kekuatan yang seimbang, maka keduanya akan membatasi gerak-gerik mereka karena tidak ada yang merasa menganiaya ataupun teraniaya. Kedua kubu akan tunduk dan dampak yang lebih besar ialah, tidak akan terjadi gencatan senjata antara satu sama lain (Dugis, 2016).

Balance of power memiliki tiga konsep yaitu hard balancing, soft balancing, dan asymmetry balancing. Hard balancing lebih mengacu pada negara-negara yang terlibat dalam konflik dan

persaingan antar negara dipihak yang sama. Konsep ini memiliki strategi dalam bentuk meningkatkan kekuatan militer, menjalin hubungan diplomatik yang membantu keamanan wilayah mereka. Kemudian soft balancing mengacu pada negara-negara yang memiliki pemahaman yang sama terkait keamanan suatu wilayah secara bersama-sama. Akan tetapi, mereka masih membutuhkan kerjasama aliansi yang formal dalam menyeimbangkan kekuatan dari penguasaan hegemoni. Dalam hal semacam ini, aliansi yang terbentuk hanya bersifat dalam jangka waktu yang begitu singkat dan bertujuan untuk mengancam kubu kawan dan agar mereka merasa terancam. Konsep semacam ini berlandaskan pada kerjasama militer yang begitu terbatas, memiliki praktik kooperatif yang khusus dan adanya pembentukan lembaga regional ataupun internasional. Semua aliansi-aliansi di atas ditekankan sekali lagi hanya bersifat sementara. Soft balancing tersebut terjadi apabila ancaman yang datang dari pihak lawan mulai naik dan sering terjadi atau sedang dalam masa intens. Adapun yang terakhir yaitu asymmetry balancing. Konsep terakhir ini lebih terfokus pada negara-negara yang sedang menyeimbangkan serta menyelaraskan ancaman yang datang dari aktor-aktor subnasional seperti teroris dan kelompok bersenjata lainnya. Namun konsep ini juga dapat mengacu pada posisi yang sebaliknya, dimana aktor subnasional yang berusaha menentang negara dan menyeimbangkan kekuatannya dengan dominasi negara (T.V. Paul, 2022).

Semua aspek-aspek balance of power di atas mencakup pada rasio kemampuan yang dimiliki antara negara atau aliansi, atau hanya dapat dimaknai sebagai rasio yang relatif sama. Balance of power lebih mengacu pada ide meeting force with force, yaitu keadaan seimbang yang akan dicapai apabila terdapat dua kekuatan yang berimbang dan saling bertemu (Dugis, 2016), terdapat aspek yang harus dipenuhi, yaitu kondisi sistem internasional anarki di mana terdapat aktor yang ingin selamat dari ancaman. Balance of power merupakan elemen penting untuk mewujudkan stabilitas pada sistem internasional anarki.

Aktivitas-aktivitas serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Maroko dalam menghadapi Sahara Barat sangat jelas dan nyata. Hal ini dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber di antaranya kebijakan dalam negeri maupun kerjasama antar-negara lain.

Di dalam negara sendiri, Maroko membentuk sebuah dewan yang bernama Royal Advisory Council for Saharan Affairs (CORCAS) atau Dewan Penasehat Kerajaan untuk Sahara Maroko. Tugas dari dewan ini ialah mengontrol dan menyiapkan siasat dalam penyerangannya terhadap Sahara Barat. Dewan ini dibentuk juga karena perebutan wilayah Sahara Barat sudah menjadi isu yang begitu diprioritaskan di Maroko, sehingga dalam perebutan tersebut tentu harus dibutuhkan usaha dari dalam negara lebih dahulu (TRUMP, 2020).

Adapun pada aspek eksternal, Maroko menjalin Kerjasama dengan negara-negara super power seperti Amerika dan Prancis untuk mengimbangi pergerakan Sahara Barat yang disuplai persenjataan oleh Libya dan Aljazair. Tidak hanya itu, Aljazair juga mau mengungsi penduduk-penduduk Sahara Barat yang terdampak (Ariyati, 2020), saat ini, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) masih terus mengurus konflik antara keduanya. PBB banyak memberikan kontribusi agar kedua negara tersebut berdamai, hingga mengirimkan tetara perdamaian demi berakhirnya konflik antara keduanya (Ariyati, 2020).

Namun, Maroko tidak akan kalah. Maroko tetap bersikukuh mencari dukungan-dukungan lainnya. Pada mulanya Maroko keluar dari Uni Afrika (UA) kini bergabung kembali, karena dengan keluarnya ia dari UA justru hanya memperburuk keadaan dan akan menghilangkan partisipan yang mendukungnya dalam perebutan wilayah Sahara Barat. Begitu banyak yang dilakukan oleh kedua kubu untuk mengimbangi masing-masing dari mereka. Kegiatan penyeimbangan itu bisa disebut balance of power.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat merupakan konflik yang sudah lahir sejak pertengahan abad ke-19 dan mulai memanas lagi setelah perang dunia kedua ketika Spanyol melepas daerah jajahannya pada tahun 1975. Peran Maroko dalam merebut kekuasaan di wilayah Sahara Barat yang dianggap daerah kekuasaannya di masa lampau menuai banyak kontroversial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Maroko dalam menaklukkan Sahara Barat memiliki latar belakang untuk menguatkan kepentingan nasional baik dari bidang ketatanegaraan dan keseimbangan stabilitas

hubungan internasional, maupun pada aspek ekonomi. Dalam hal ini kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Maroko mampu menyeimbangi gencatan-gencatan dari dalam maupun dari luar. Dukungan PBB terhadap Sahara Barat dan kerjasama negara-negara sekitarnya seperti Aljazair dan Libya juga terjalin untuk menundukkan Maroko masih mampu diseimbangkan oleh Maroko dengan membangun kerjasama antara negara-negara super power seperti Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, penyediaan alutsista untuk perang selalu disediakan untuk melawan serangan-serangan yang digencarkan oleh Sahara Barat. Dalam hal seperti ini, konsep balance of power sudah sangat tampak nyata, di mana Maroko selalu berhasil mengimbangi rivalnya.

REFERENSI

- Wikipedia. (2021). *Western Sahara conflict*. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Sahara_conflict#:~:text=The%20Western%20Sahara%20conflict%20is,and%20the%20Kingdom%20of%20Morocco.
- Aarnee, J. (2020). Peran Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam Mencari Jawaban atas Konflik Sahara Barat. *jurnal Hubungan Internasional*.
- Al Priyadi Hidayat, B. W. (2005). *Penggunaan Substruktur Waffle Slab pada Kawasan Terapung Kompleks Kantor Bupati Kutai Tengah*. Dosen ITATS.
- ARIFIN. (2016). faktor-faktor keterlibatan aljazair dalam konflik maroko - sahara barat pada tahun 2000-2013. *Jurnal ilmu hubungan internasional*.
- Ariyati. (2020). Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and resolution Effort. *International Relations Journal*, 30-40.
- Dugis, V. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat*. Retrieved from Daftar Duta Besar Indonesia untuk Maroko: <https://kemlu.go.id/rabat/id>

- Maddy-Weitzman, B. (1991). Conflict and Conflict Management in the Western Sahara: Is the Endgame near? *Middle East Journal*, 594-607.
- Martina, S. (n.d.). *Manuver Diplomasi Maroko Ciptakan Ketegangan di Sahara Barat*. Retrieved from <https://www.dw.com/id/manuver-diplomasi-maroko-ciptakan-ketegangan-baru-di-sahara-barat/a-53128313>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- PUTRI, M. A. (2014). Peran Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Antara Maroko Dan Sahara Barat Tahun 2010-2012. *eJournal Hubungan Internasional* <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1126>.
- Reilly, P. H. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. AMEPRO.
- Setiawan, D. B. (2021). Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) Dalam Perspektif Neorealisme. *DEFENDONESIA*.
- T.V. Paul, J. J. (2022). *Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance". Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Retrieved from <https://doi.org/10.1515/9780804767422-004>
- TRUMP, D. J. (2020). *Proclamation on Recognizing The Sovereignty Of The Kingdom Of Morocco Over The Western Sahara*. Retrieved from <http://www.corcas.com/Default.aspx?tabid=710>
- Wafa, M. I. (2019). Kepentingan Maroko Bergabung Kembali Dalam African Union. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3058>, 1309-1324.
- YOGA, P. G. (2017). *Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Maroko dengan Front Polisario di Sahara Barat 2009-2014*. Retrieved from <http://eprints.upnyk.ac.id/13396/>